

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) merupakan salah satu provinsi Indonesia yang terletak di Pulau Kalimantan dengan populasi berjumlah 2.7 juta jiwa yang diambil dari data terakhir BPS (badan Pusat Statistik) Kalimantan Tengah. Dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat dan terbilang banyak ini, maka diperlukannya program atau kebijakan dari pemerintah untuk menunjang masyarakat Kalimantan Tengah agar hidup lebih sejahtera baik dari segi sosial, maupun pendidikan, serta dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang mengikuti perkembangan global. Untuk itu, diperlukannya program atau kebijakan-kebijakan pemerintah dengan tujuan adanya Pembangunan Nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara merata material maupun spiritual, serta dapat menjalankan perekonomian yang baik guna mewujudkan kesejahteraan sosial. Pembangunan nasional merupakan upaya peningkatan kualitas manusia atau masyarakat secara berkesinambungan dengan mengikuti perkembangan zaman. Sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 dimana sebagai dasar untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui peranan dan berpihaknya Negara dalam meningkatkan taraf hidup rakyat.

Dengan adanya tujuan Pembangunan Nasional dan Pasal 33 UUD 1945 tersebut akan berhasil tercapai apabila pemerintah dan masyarakat saling bersinergi dalam proses pembangunan, termasuk di bidang kesejahteraan sosial. Dalam permasalahan ini yang mengarah pada kesejahteraan sosial berada pada kasus putusnya pendidikan atau tidak lanjut sekolah pada anak, sehingga dapat

menyebabkan munculnya peningkatan jumlah pengangguran karena kurangnya pendidikan yang memadai. oleh sebab itu, tingkat pendidikan yang rendah dapat mengakibatkan seseorang cenderung kurang memiliki keterampilan, wawasan dan pengetahuan yang memadai untuk kehidupannya. Sedangkan untuk dunia kerja maupun dunia usaha, pendidikan serta keterampilan adalah modal untuk bersaing dalam mendapatkan kesejahteraan nantinya. Dapat kita lihat dari era zaman sekarang, sebagian masyarakat masih berada di dalam lingkaran kemiskinan yang memicu munculnya kasus putus pendidikan ataupun tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Permasalahan kemiskinan seringkali mencangkup sandang, pangan, papan merupakan suatu hal serius yang harus dihadapi dan ditanggulangi oleh wilayah provinsi Kalimantan Tengah yang mana peran pemerintah masih sangat diperlukan untuk terus menunjang masyarakatnya agar hidup sejahtera baik dalam segi sosial maupun pendidikan. Terjadinya kemiskinan atau masalah sosial kerap kali dikarenakan faktor Internal dan faktor Eksternal, yang mana faktor internal merupakan ketidakmampuan dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang dihadapinya. Sedangkan faktor eksternal merupakan kebijakan publik yang belum berpihak kepada masyarakat kurang mampu, tidak tersedianya pelayanan sosial dasar, kesenjangan, dan ketidakadilan yang didapat. Masalah sosial yang kerap kali terjadi dapat menimbulkan lemahnya moral dan etika, sehingga dapat menjadi pemicu tindakan kejahatan, kriminal, pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM. Oleh sebab itu, sangat diperlukannya kebijakan-kebijakan serta program pemerintah yang harus disebarakan secara merata kepada warga yang kurang mampu dan mengoptimalkan penanggulangan kemiskinan.

Penanggulangan kemiskinan merupakan suatu kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok atau

masyarakat yang tidak memiliki sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat, memperkuat peran masyarakat, dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar, serta mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat kurang mampu dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan, dan memberi rasa aman bagi kelompok masyarakat kurang mampu. Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan secara terpadu dan simultan oleh pemerintah bersama masyarakat.

Menurut data terakhir dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, menjelaskan bahwa tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah pada bulan Maret 2019 tercatat sebesar 134.594 orang (4,98%), kemudian berkurang sebesar 1.852 orang dibandingkan dengan kondisi September 2018 yang mencapai sebesar 136.446 orang (5,10%). Penurunan tingkat kemiskinan tersebut dipengaruhi dari program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk dapat mengurangi beban perekonomian masyarakat.

Kebijakan perlindungan sosial salah satunya yang diberikan pemerintah adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). BPNT difokuskan untuk meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat miskin dan tujuan umum BPNT adalah mengurangi angka dan memutuskan rantai kemiskinan. Sebenarnya, Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan transformasi dari Program Rastra (Beras Sejahtera) oleh pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Alasan pemerintah merubah Program Rastra menjadi Program Bantuan Non Tunai (BPNT) yang pada

awalnya, program BPNT merupakan program pengganti dari Program Beras Sejahtera (Rastra) yang memiliki beberapa permasalahan. Raskin merupakan program dari pemerintah berupa bantuan beras bersubsidi untuk membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Penyaluran raskin (Beras untuk Rumah Tangga Miskin) sudah dimulai sejak 1998. Krisis moneter tahun 1998 merupakan awal pelaksanaan Raskin yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga terutama rumah tangga miskin. Pada awalnya disebut program Operasi Pasar Khusus (OPK), kemudian diubah menjadi Raskin mulai tahun 2002, Raskin diperluas fungsinya tidak lagi menjadi program darurat *social safety net* melainkan sebagai bagian dari program perlindungan sosial masyarakat. Melalui sebuah kajian ilmiah, penamaan Raskin menjadi nama program diharapkan akan menjadi lebih tepat sasaran dan mencapai tujuan membantu masyarakat miskin. Program raskin pada bulan september 2015 telah di ganti nama menjadi program beras sejahtera (rastra).

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa (2015) Mengungkapkan penggantian nama beras bantuan bagi masyarakat miskin atau beras miskin (raskin) menjadi beras sejahtera (rastra) yaitu untuk mengubah pemikiran masyarakat, yang mana pemikiran sebelumnya beras ini untuk membantu masyarakat miskin, tapi untuk mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera. Program ini di Instruksi oleh Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, dalam hal ini pemerintah di tugaskan untuk mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera serta mengurangi beban pengeluaran para rumah tangga sasaran dalam memenuhi kebutuhan dan ketersediaan pangan.

Rastra adalah Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran

para Keluarga Sasaran Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok sebagai salah satu hak dasarnya. (Buku Pedoman Subsidi Rastra, 2018). Program Beras untuk Keluarga Sejahtera (Program Rastra) juga merupakan Program Nasional lintas sektoral yang diperuntukkan bagi keluarga penerima manfaat sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahananpangan untuk menyangga kualitas hidup masyarakat tidak mampu dan memberikan perlindungan sosial (kemendagri, 2018).

Bantuan Pangan Non tunai (BPNT) bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non tunai (BPNT) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan dan memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi. Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yaitu salah satunya untuk meningkatnya ketahanan pangan di tingkat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Peserta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dipersyaratkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tercantum dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. Pemerintah Indonesia selalu memberikan perhatian dan tanggung jawab terhadap masyarakat Indonesia yang menyangkut soal kesejahteraan sosial. Sebagaimana yang telah dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Alasan peneliti memilih di Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut tepatnya berlokasi di gang Nusantara Danau Seha, RT 004/RW 002 sebagai wilayah tempat peneliti melakukan penelitian adalah dikarenakan kawasan yang termasuk tingkat perekonomiannya rendah sehingga banyaknya warga yang

menerima program Bantuan Pangan Non Tunai ini dibandingkan wilayah lain, namun pemerintah jarang memberikan perhatian secara langsung kepada warga di wilayah tersebut, sehingga ditemukannya ketidaktepatan sasaran penerima bantuan sosial ini atau disalurkan kepada orang yang tidak membutuhkan. Berdasarkan alasan tersebut membuat peneliti tertarik melakukan penelitian di wilayah Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut tersebut, sekaligus mengukur sejauh mana program bantuan sosial yang diberikan pemerintah itu dapat berjalan. Bagi Masyarakat yang mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) termasuk dalam jenis golongan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tidak memiliki pendamping dan tidak diberikan anggaran, sehingga tidak ada yang mengawasi dan memantau Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini dan karena tidak memiliki anggaran yang diberikan kepada Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Hal inilah yang membuat pihak Dinas Sosial Kota Palangka Raya tidak pernah turun ke lapangan untuk memantau dan mengontrol jalannya Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di wilayah-wilayah Kota Palangka Raya dan yang diperoleh dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa proses pelaksanaan program BPNT ditunjukkan melalui adanya keluarga yang tidak tepat sasaran menjadi KPM dari Program BPNT, serta minimnya pengetahuan warga terhadap program tersebut. Oleh sebab itu, adanya masyarakat yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan ada yang tidak memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Namun jumlah bantuan yang disalurkan sudah sesuai dengan amanat dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Program BPNT dan kualitas bahan pokok yang disediakan, seperti beras dan telur yang berkualitas baik dan layak untuk dikonsumsi.

Pemicu dari permasalahan yang terjadi di kalangan masyarakat ini terkait dengan evaluasi terhadap pelaksanaan program yang perlu dilakukan dengan

mengukur sejauh mana ketepatan sasaran sebuah program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini berjalan yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Palangka Raya. Mengacu pada indikasi permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam dengan judul penelitian adalah: **“SASARAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI KELURAHAN LANGKAI PALANGKA RAYA”**.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana efektivitas Program BPNT di Kelurahan Langkai kota Palangka Raya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dituliskan maka Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui bagaimana efektivitas serta ketepatan sasaran pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut kota Palangka Raya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, terutama terkait dengan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program BPNT ini. Selain itu juga hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan referensi oleh peneliti lainnya dengan penelitian yang serupa atau hampir serupa di tempat lain.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif bagi Dinas Sosial Kota Palangka Raya dalam melaksanakan Program

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi beban masyarakat.

